



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 527, TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR DATA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, perlu dilakukan penetapan daftar data dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak;
- b. bahwa Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan dan penyepakatan Daftar Data Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan melibatkan Walidata Kabupaten Temanggung, Pembina Data Kabupaten Temanggung, dan Produsen Data Kabupaten Temanggung, yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa Daftar Data Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak di Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Data Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

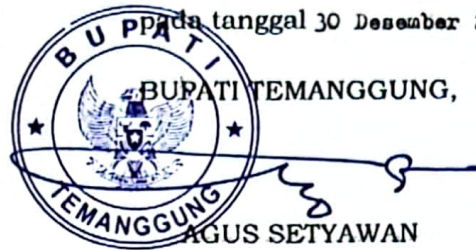
Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Data Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memuat:
- a. ID Daftar Data Prioritas Nasional;
 - b. Nama Data;
 - c. Jenis Data;
 - d. Satuan;
 - e. Definisi Operasional;
 - f. Produsen Data; dan
 - g. Pemutakhiran Data.
- KETIGA** : Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini wajib dikumpulkan oleh Produsen Data kepada Walidata dengan memperhatikan pemenuhan terhadap prinsip Satu Data Indonesia.
- KEEMPAT** : Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini merupakan pedoman dalam penyediaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung serta disebarluaskan melalui portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 30 Desember 2025



AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
2. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
3. Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung

DAFTAR DATA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
1	02.01.034	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Statistik	persen	Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah industri pengolahan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri pengolahan. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah pengolahan di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.	BPS	Tahunan
2	02.03.004	Indeks Ketahanan Pangan	Statistik	indeks	Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	DKPPP	Tahunan
3	02.03.060	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment	Statistik	persen	(Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	DKPPP	Tahunan
4	02.05.002	Jumlah Produksi Daging	Statistik	kilogram	Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.	DKPPP	Tahunan
5	02.05.003	Jumlah Produksi Susu	Statistik	liter	Banyaknya susu yang diproduksi oleh ternak, termasuk yang diberikan kepada anak ternak, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.	DKPPP	Tahunan
6	02.05.004	Jumlah Produksi Telur Unggas	Statistik	kilogram	Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.	DKPPP	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
7	02.09.0001	Data Koperasi aktif di Indonesia menurut Kabupaten /Kota	Statistik	Unit	Jumlah Koperasi aktif di Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan tingkat Kabupaten Kota	Dinkopdag	Tahunan
8	02.09.0005	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Statistik	rupiah	Total nilai seluruh usaha koperasi dari semua sektor (konsumsi, jasa, simpan pinjam, dan produksi), mencakup nilai penjualan, penerimaan jasa, serta pembiayaan yang dilakukan koperasi dalam satu tahun buku.	Dinkopdag	Tahunan
9	02.11.0050	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Statistik	Kunjungan	Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata...	Dinbudpar	Bulanan
10	02.11.0051	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Statistik	Kunjungan	Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau...	Dinbudpar	Bulanan
11	02.11.007	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Statistik	Orang	Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata.	Dinbudpar	Tahunan
12	03.01.049	Luas Daerah Irigasi	Statistik	hektar	Area sawah atau lahan pertanian yang menerima pasokan air melalui sistem irigasi yang dikelola	DPUPR	Tahunan
13	03.01.070	Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka	Statistik	persen	Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya.	DINKES	Tahunan
14	03.03.0013	Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Uji Tipe	Statistik	Unit	Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yaitu sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.	Dinhub	Tahunan
15	03.03.024	Jumlah Terminal Penumpang yang Beroperasi	Statistik	lokasi	Banyaknya terminal bus penumpang tipe A yang digunakan sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.	Dinhub	Tahunan
16	03.05.0004	Jumlah desa dengan status Mandiri	Statistik	desa	Jumlah desa yang memiliki status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Dinpermades	Tahunan
17	03.05.0009	Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Statistik	Orang	Jumlah individu yang secara aktif dipekerjakan oleh unit usaha milik desa (BUMDes), yang dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepegawaian, dalam satu periode pelaporan.	Dinpermades	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
18	03.05.019	Persentase Desa Mandiri	Statistik	persen	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.	Dinpermades	Tahunan
19	03.07.001	Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR)	Statistik	indeks	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun.	DPPPAPPKB	Tahunan
20	03.07.0018	Jumlah penduduk	Statistik	Orang	Total populasi yang tercatat dalam wilayah tertentu pada periode yang sama	Dindukcapil	Tahunan
21	03.07.002	Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR)	Statistik	indeks	Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun).	DPPPAPPKB	Tahunan
22	03.07.003	Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi	Statistik	persen	Prevalensi kontrasepsi modern adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, terhadap seluruh PUS. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).	DPPPAPPKB	Tahunan
23	03.07.0030	Laju Pertumbuhan Penduduk	Statistik	persen	Angka yang menunjukkan persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu	BPS	Tahunan
24	03.07.015	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan	Statistik	tahun	Median Usia Kawin Pertama (mUKP) wanita adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 15-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu.	DPPPAPPKB	Tahunan
25	03.07.019	Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana	Statistik	persen	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) adalah persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.	DPPPAPPKB	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
26	04.01.001	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Statistik	persen	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh.	Dinkes	Tahunan
27	04.01.006	Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)	Statistik	indeks	Angkatan Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: • 70 sangat tinggi, • 40-70 tinggi, • 20-39 sedang, • dan	Dinkes	Tahunan
28	04.01.007	Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)	Statistik	indeks	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.	Dinkes	Tahunan
29	04.01.0079	Jumlah peserta didik perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat	Statistik	Orang	Total jumlah anak perempuan yang terdaftar di kelas 5 SD atau tingkat pendidikan sederajat dalam periode yang sama	Dindikpora	Tahunan
30	04.01.020	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)	Statistik	persen	Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional, ini melibatkan beberapa langkah penting: Deteksi Gejala: Identifikasi individu yang menunjukkan gejala TBC, seperti batuk kronis, nyeri dada, penurunan berat badan, demam, dan keringat malam. Pemeriksaan Klinis: Evaluasi klinis oleh tenaga medis untuk menilai kemungkinan adanya infeksi TBC berdasarkan gejala, riwayat kesehatan, dan faktor risiko. Tes Diagnostik: Tes Tuberkulin (Mantoux): Uji kulit untuk mendeteksi reaksi imun terhadap bakteri TBC. Sputum Examination: Pemeriksaan dahak untuk menemukan bakteri TBC melalui mikroskopi atau kultur. Tes Molekuler: Tes berbasis DNA untuk mendeteksi keberadaan genetik bakteri TBC. Konfirmasi Diagnosis: Berdasarkan hasil tes, dokter menentukan apakah seseorang terdiagnosis TBC atau tidak.	Dinkes	Tahunan
31	04.01.073	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	Statistik	persen	Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0—59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau perkembangannya (motorik kasar, motorik halus, bicara-bahasa, sosialisasi kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.	Dinkes	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
32	04.01.074	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal	Statistik	persen	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar sebanyak 3 kali dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam, 1x pada hari ke 3-7 dan 1 x pada hari ke 8-28 setelah dilahirkan pada wilayah dan kurun waktu yang tertentu. Standar kunjungan neonatal meliputi: • Pemeriksaan neonatus menggunakan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) • Perawatan metode Kangguru (PMK) untuk bayi BBLR	Dinkes	Tahunan
33	04.01.141	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	Statistik	persen	1.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. 2.Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.	Dinkes	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
34	04.01.148	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar	Statistik	persen	Persentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non-perkotaan) untuk RPJMN 2025-2029. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar: 1. Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, nutrisisionis, sanitasi lingkungan/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan 2. Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan 3. Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi dan mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku/tenaga kesehatan	Dinkes	Tahunan
35	04.01.175	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 Tahun	Statistik	persen	Anemia adalah suatu kondisi yang menunjukkan jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Ibu hamil anemia adalah ibu hamil dengan kadar Hb 11,0 g/dl yang diperiksa pada saat kunjungan pertama (K1). Ibu hamil dengan anemia memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan anemia defisiensi besi yang bisa bertahan sepanjang usia awal anak dan menghambat pertumbuhan sel-sel otak anak serta sel- sel tubuh lainnya, yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan (Pedoman Program Pemberian Dan Pemantauan Mutu Tablet Tambah Darah Untuk Ibu Hamil).	Dinkes	Tahunan
36	04.01.177	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas	Statistik	persen	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentu	Dinkes	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
37	04.01.180	Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita	Statistik	persen	Stunting (pendek/ sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0	Dinkes	Tahunan
38	04.01.181	Prevalensi Wasting pada Balita	Statistik	persen	Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:■Sangat Kurus : Zscore -3,0■Kurus : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore -2,0	Dinkes	Tahunan
39	04.01.199	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Statistik	persen	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	BPS	Tahunan
40	04.02.007	Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera	Statistik	Kartu Keluarga	Penerima bantuan sosial (PKH/Sembako/KIS/KIP) yang berhasil meningkat kesejahteraannya setelah menerima bantuan sosial. Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan hidup penerima manfaat.	DINSOS	Tahunan
41	04.02.051	Persentase Penduduk Miskin	Statistik	persen	Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan	BPS	Tahunan
42	04.02.053	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan	Statistik	persen	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diprosi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.	BPS	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
43	04.03.002	Indeks Pembangunan Gender	Statistik	Indeks	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.	BPS	Tahunan
44	04.03.023	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Statistik	persen	Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.	Sekretariat DPRD	Tahunan
45	04.03.024	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif	Statistik	persen	Konsep dan Definisi:Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.	BKPSDM	Tahunan
46	04.03.025	Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan	Statistik	persen	Perbandingan antara Jumlah perempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh selain pasangan dalam periode 12 bulan terakhir dengan perempuan berusia 15-64 tahun. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.Proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan oleh selain pasangan pada sebagian besar survei mengumpulkan informasi yang terbatas pada paksaan melakukan hubungan seksual ketika perempuan tersebut tidak ingin melakukan, serta mencoba untuk memaksa seseorang untuk bertindak seksual melawan kehendaknya atau mencoba untuk memaksa dia ke hubungan seksual.	DPPPAPPKB	TIGA Tahunan
47	04.03.036	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	Statistik	persen	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir adalah prevalensi terjadinya minimal satu kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun, baik kekerasan fisik, seksual atau emosional.	DPPPAPPKB	TIGA Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
48	05.01.0007	Jumlah CV yang sudah terdaftar berdasarkan provinsi	Statistik	Dokumen	banyaknya total keseluruhan CV yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di Indonesia	DPMPTSP	Tahunan
49	05.01.0029	Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jenis peraturan	Statistik	Dokumen	Merupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Tahunan
50	05.01.0030	Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan tahun	Statistik	Dokumen	Merupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Tahunan
51	06.01.001	Angka Anak Tidak Sekolah	Statistik	persen	Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah yaitu 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan.	Dindikpora	Tahunan
52	06.01.002	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Statistik	tahun	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	BPS	Tahunan
53	06.01.0044	Jumlah guru dan tenaga kependidikan	Statistik	Orang	Definisi: Total jumlah guru dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan formal dan nonformal.	Dindikpora	Tahunan
54	06.01.0045	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik	Statistik	Orang	Definisi: Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik.	Dindikpora	Tahunan
55	06.01.0048	Jumlah guru per jenjang pendidikan	Statistik	Orang	Jumlah guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB	Dindikpora	Tahunan
56	06.01.0049	Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	Statistik	Orang	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dindikpora	Tahunan
57	06.01.0097	Jumlah Satuan Pendidikan	Statistik	Unit	Banyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	Dindikpora	Tahunan
58	06.01.0098	Jumlah Satuan Pendidikan dengan Akreditasi Minimal B	Statistik	Unit	Jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat minimal B	Dindikpora	Tahunan
59	06.01.0099	Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Statistik	Unit	Jumlah total satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang telah mendapatkan akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan	Dindikpora	Tahunan
60	06.01.0101	Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah menerapkan kurikulum terkini	Statistik	Unit	Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah mengadopsi dan menerapkan kurikulum terbaru yang berfokus pada konteks peserta didik, pengembangan karakter, dan kompetensi esensial.	Dindikpora	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
61	06.01.0107	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Statistik	Unit	Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan hasil Asesmen Nasional untuk perencanaan dan peningkatan kualitas pembelajaran.	Dindikpora	Tahunan
62	06.01.0115	Jumlah Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran	Statistik	Unit	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki akses internet yang digunakan secara aktif untuk kegiatan pembelajaran	Dindikpora	Tahunan
63	06.01.0116	Jumlah Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran	Statistik	Unit	Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki fasilitas komputer yang digunakan untuk tujuan pembelajaran	Dindikpora	Tahunan
64	06.01.0117	Jumlah Sekolah dengan Akses Listrik	Statistik	Unit	Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki akses ke fasilitas listrik	Dindikpora	Tahunan
65	06.01.0118	Jumlah Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak	Statistik	Unit	Jumlah sekolah yang memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi kriteria kelayakan. Air minum layak mencakup sumber-sumber seperti air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH), mata air terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran atau penampungan limbah	Dindikpora	Tahunan
66	06.01.0119	Jumlah Sekolah dengan Fasilitas Cuci Tangan	Statistik	Unit	Jumlah satuan pendidikan pada tingkat tertentu (misalnya SD, SMP, SMA) yang memiliki fasilitas cuci tangan yang memenuhi standar WASH, yaitu tersedia air mengalir, sabun, dan kondisi higienis	Dindikpora	Tahunan
67	06.01.0120	Jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	Statistik	Unit	Jumlah sekolah yang memiliki minimal 5 komputer dan akses internet yang digunakan untuk tujuan pembelajaran.	Dindikpora	Tahunan
68	06.01.0139	Total jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal	Statistik	Unit	Keseluruhan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.	Dindikpora	Tahunan
69	06.01.0140	Total jumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.	Statistik	Unit	Total jumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.	Dindikpora	Tahunan
70	06.01.026	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional	Statistik	persen	Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2.Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.	Dindikpora	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
71	06.01.033	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	Statistik	persen	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik terhadap jumlah seluruh guru dan tenaga kependidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: 1. Kepala Sekolah, yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK/TKLB atau bentuk lain yang sederajat, SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN); dan 2. Pengawas Sekolah yaitu Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.	Dindikpora	Tahunan
72	06.01.042	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	Statistik	persen	Perbandingan jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. Sekolah diasumsikan telah memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran apabila dalam sekolah tersebut tersedia 5 komputer dan sambungan internet.	Dindikpora	Tahunan
73	06.01.050	Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran	Statistik	persen	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Dindikpora	Tahunan
74	06.01.051	Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran	Statistik	persen	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Dindikpora	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
75	06.01.052	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak	Statistik	persen	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Dindikpora	Tahunan
76	06.01.053	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan	Statistik	persen	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Dindikpora	Tahunan
77	06.01.054	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar	Statistik	persen	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Dindikpora	Tahunan
78	06.01.066	Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik	Statistik	persen	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).	Dindikpora	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
79	06.01.084	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Statistik	tahun	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: Tidak punya ijazah = 0 tahun; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; Profesi = 18 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun; Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1	BPS	Tahunan
80	06.01.099	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat	Statistik	persen	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.	Dindikpora	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
81	06.01.101	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat	Statistik	persen	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajar masuk SMP/ sederajat adalah 13 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SMP/ sederajat pada usia sekitar 15 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SMP/ sederajat adalah anak atau remaja usia 16 tahun (15 + 1 tahun) sampai dengan 18 tahun (15 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.	Dindikpora	Tahunan
82	06.02.0006	Jumlah angkatan kerja	Statistik	Orang	jumlah angkatan kerja: Jumlah individu yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dalam suatu wilayah pada periode tertentu total angkatan kerja: Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta pengangguran.	Dinperinaker	Tahunan
83	06.02.0034	Jumlah Pengangguran	Statistik	Orang	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha,	Dinperinaker	Tahunan
84	06.02.0057	Total Angkatan Kerja	Statistik	Orang	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta pengangguran.	Dinperinaker	Tahunan
85	06.02.061	Tingkat Pengangguran Terbuka	Statistik	persen	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	BPS	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
86	06.02.065	Upah Rata-rata per Jam Kerja	Statistik	rupiah	Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya.Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.	Dinperinaker	Tahunan
87	06.03.0058	Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat	Statistik	produk	Banyaknya produk inovasi yang dihasilkan oleh BRIN yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah atau institusi selain industri seperti kelompok masyarakat, asosiasi, pemerintah daerah, atau entitas/lembaga lainnya, serta masyarakat	Bapperida	Tahunan
88	07.05.001	Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Statistik	ton	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.	DPRKPLH	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
89	07.05.006	Indeks Kualitas Air	Statistik	indeks	Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks pencemar maka semakin buruk kualitas airnya. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total fosfat); fecal coli dan total coli. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.	DPRKPLH	Tahunan
90	07.05.012	Indeks Kualitas Udara	Statistik	indeks	Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO2, SO2 dan PM2,5	DPRKPLH	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
91	07.05.021	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Statistik	juta ton CO2e	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK Tahunan adalah jumlah emisi GRK Tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (blue carbon).	DPRKPLH	Tahunan
92	07.05.080	Persentase Sampah yang Terkelola	Statistik	persen	sampah yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan, penanganan, dan keberlanjutan, sehingga tidak mencemari lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta ekonomi baik melalui pengurangan sampah (Upaya untuk mencegah atau mengurangi timbulan sampah, baik dari sumber rumah tangga, komersial, maupun industri) maupun penanganan sampah (pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah). dalam hal ini Sampah di TPA open dumping tidak dihitung sebagai sampah terkelola	DPRKPLH	Tahunan
93	07.05.087	Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Statistik	persen	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK Tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline untuk periode yang sama.	DPRKPLH	Tahunan
94	08.02.0001	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Statistik	Orang	Banyaknya orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi perpustakaan	Dinpusip	Tahunan
95	08.02.0005	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Statistik	persen	Persentase pemanfaatan perpustakaan secara luring dan daring	Dinpusip	Tahunan
96	08.02.003	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Statistik	Indeks	Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.	Dinpusip	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
97	08.02.025	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Statistik	Indeks	Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu.	Dinpusip	Tahunan
98	09.01.017	Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Statistik	persen	Kondef: Jumlah anak umur 0?17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya dibagi dengan jumlah anak umur 0?17 tahun dikalikan 100?%	Dindukcapil	Tahunan
99	09.02.026	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita	Statistik	persen	PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu.	BPS	Tahunan
100	09.02.051	Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita	Statistik	ribu rupiah	PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk.	BPS	Tahunan
101	09.02.052	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Statistik	ribu rupiah	Nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu tertentu, dihitung menggunakan harga-harga yang berlaku pada saat produksi itu terjadi, dan berguna untuk menganalisis pergeseran serta struktur ekonomi wilayah tersebut.	BPS	Tahunan
102	09.02.073	Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax Ratio	Statistik	persen	Perbandingan atau presentasi penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Indikator ini (tax ratio) berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara. Tax ratio berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Berdasarkan formula-nya, tax ratio dibagi menjadi arti sempit dan arti luas. Definisi komponen pajak dalam tax ratio arti sempit didasarkan pada perhitungan pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat. Tax ratio arti luas mencakup pajak pemerintah pusat, pajak daerah, dan PNBP SDA Migas sebagai pembilang. Tax ratio yang digunakan di Indonesia adalah arti sempit, sesuai dengan perhitungan yang digunakan Kementerian Keuangan, World Bank, dan IMF.	BPS	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
103	09.03.005	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Statistik	indeks	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di segala tingkatan pemerintahan secara merata dan memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. IKIP menganalisis tiga aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).;Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di segala tingkatan pemerintahan secara merata dan memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.	Dinkominfo	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
104	09.03.016	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Statistik	badan publik	Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang	Dinkominfo	Tahunan
105	09.03.050	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Statistik	persen	Konsep dan Definisi:Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis kabel serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Optic Distribution Point (ODP) adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang diluar. Kecamatan merupakan bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh camat.	Dinkominfo	Tahunan
106	09.03.063	Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet	Statistik	persen	Perbandingan antara orang yang menggunakan internet dengan jumlah masyarakat Indonesia	BPS	Tahunan
107	09.03.064	Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam	Statistik	persen	Telepon genggam/Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.	BPS	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
108	09.06.009	Indeks Sistem Merit	Statistik	indeks	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	BKPSDM	Tahunan
109	09.06.042	Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi	Statistik	persen	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi mencerminkan suatu entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko tersebut.	Inspektorat	Tahunan
110	10.01.0003	Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JPLE)	Statistik	Orang	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif.	BKPSDM	Tahunan
111	02.09.0002	Data Koperasi Merah Putih	Geospasial		Data lokasi koperasi yang tergabung dalam "Koperasi Merah Putih", termasuk titik koordinat geografis tempat koperasi beroperasi	Dinkopdag	Tahunan
112	03.01.0028	Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000	Geospasial		Daerah irigasi permukaan adalah daerah yang memanfaatkan air dari sungai, danau, atau waduk untuk mengairi lahan pertanian yang berada di daerah kawasan pertanian	DPUPR	Tahunan
113	03.06.0024	Peta Lahan Sawah yang Dilindungi skala 1:5.000 - 1:10.000	Geospasial		Peta Lahan Sawah Dilindungi sesuai dengan Kepmen ATR/Ka. BPN No. 1589/SK-HK 02.01/XII/2021 tentang Penetapan LSD pada 151 kabupaten/kota di 8 Provinsi	DPUPR	Belum Dapat Ditetapkan
114	04.01.0002	Data Geospasial Puskesmas dan Klinik Pratama	Geospasial		Kumpulan data yang berisi informasi lokasi geografis (garis lintang dan garis bujur) serta detail nama-nama seluruh Puskesmas dan Klinik Pratama yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia.	Dinkes	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
115	07.02.0015	Peta Sebaran Gardu Listrik	Geospasial		Sebaran sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi) yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik	DPUPR	Belum Dapat Ditetapkan
116	07.03.0005	Luas Kawasan Hutan	Geospasial		Tingkat atau kecepatan berkurangnya luas hutan dalam suatu periode waktu tertentu	DPUPR	Tahunan
117	07.03.0029	Peta Penetapan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Geospasial		Merupakan layer Peta yang menunjukkan tahap akhir dari tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu dimulai dari Penunjukan Kawasan Hutan, kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di lapangan, yang temu gelang kemudian Penetapan Kawasan Hutan daratan dan perairan.	DPUPR	Tahunan
118	07.03.0050	Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000	Geospasial		Peta yang menyajikan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan	BPBD	Tahunan
119	07.05.0061	Peta Bahaya Banjir	Geospasial		Bahaya Banjir adalah potensi terjadinya bencana banjir pada satu wilayah sesuai karakteristik penyebabnya	BPBD	Tahunan
120	07.05.0065	Peta Cekungan Air Tanah	Geospasial		Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung	DPUPR	Belum Dapat Ditetapkan
121	07.05.0067	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000	Geospasial		Peta yang menunjukkan rata-rata curah hujan Tahunan secara spasial dan peta rata-rata hari hujan Tahunan di wilayah Indonesia.	DPUPR	Lima Tahunan
122	07.05.0068	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000	Geospasial		Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.	DPUPR	Belum Dapat Ditetapkan
123	07.05.0075	Peta Geologi skala 1:100.000	Geospasial		Fitur yang menggambarkan keadaan tanah dan batuan yang ada pada lapisan teratas bumi (kerak bumi), dikelompokkan berdasarkan simbol dan nama formasi	DPUPR	Tahunan
124	07.05.0128	Peta Risiko Bencana Banjir skala 1:250.000	Geospasial		Risiko bencana banjir adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat banjir pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut yang tinggi, atau kerusakan infrastruktur pengairan.	BPBD	Lima Tahunan
125	07.05.0132	Peta Risiko Bencana Gempabumi skala 1:250.000	Geospasial		Risiko bencana gempabumi adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat gempabumi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Gempabumi dapat menyebabkan berbagai dampak, seperti kerusakan bangunan, tsunami, dan kebakaran.	BPBD	Lima Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
126	07.05.0135	Peta Risiko Bencana Kekeringan skala 1:250.000	Geospasial		Risiko bencana kekeringan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kekeringan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kekeringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang rendah, perubahan iklim, atau pengelolaan air yang buruk.	BPBD	Lima Tahunan
127	07.05.0136	Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api skala 1:250.000	Geospasial		Risiko bencana letusan gunung api adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat letusan gunung api pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Letusan gunung api dapat menyebabkan berbagai dampak, seperti aliran lava, hujan abu, dan semburan gas beracun.	BPBD	Lima Tahunan
128	07.05.0139	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor skala 1:250.000	Geospasial		Risiko bencana tanah longsor adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat tanah longsor pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Tanah longsor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi, erosi tanah, atau pembangunan di daerah rawan longsor.	BPBD	Lima Tahunan
129	07.05.0144	Peta Sebaran Mata Air	Geospasial		- Peta mata air merupakan data mata air yang diperoleh melalui kegiatan inventarisasi kerusakan mata air, yang berisi informasi lokasi mata air dan hasil penilaian kerusakan mata air hasil formulasi penilaian terhadap parameter kualitas air, debit air, dan penutupan lahan.	DPUPR	Belum Dapat Ditentukan
130	09.03.0001	Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Menengah; Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi; Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Resolusi minimal 1,5 m	Geospasial		a. Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit. Data satelit penginderaan jauh resolusi menengah adalah citra satelit yang menggambarkan kondisi spasial teliti, seperti pada satelit sumber daya alam dengan ketelitian spasial antara 10 – 30 meter. b. Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit. Data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi adalah citra satelit yang menggambarkan kondisi spasial sangat teliti dengan ketelitian spasial antara 1 – 4 meter. c. Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit. Data satelit penginderaan jauh resolusi sangat tinggi adalah citra satelit yang menggambarkan kondisi spasial sangat teliti dengan ketelitian spasial kurang dari 1 meter.	DPUPR	Tahunan
131	10.03.0027	Nama Rupabumi Baku	Geospasial		Nama rupabumi yang memenuhi prinsip nama rupabumi dan telah ditetapkan sebagai Nama Rupabumi Baku oleh Kepala BIG	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Tahunan

No	ID Daftar Data Prioritas Nasional	Nama Data	Jenis Data	Satuan	Definisi Operasional	Produsen Data	Pemutakhiran
132	10.03.0029	Peta Batas Administrasi Kecamatan pada minimal skala 1:25.000 dan Peta Batas Administrasi Kelurahan pada minimal skala 1:10.000	Geospasial		Peta Batas Administrasi Kelurahan minimal skala 1:10.000	DPUPR	Tahunan
133	10.03.0030	Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Skala 1:50.000	Geospasial		Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Skala 1:50.000	DPUPR	Tahunan
134	10.03.0045	Peta RBI skala 1:250.000	Geospasial		Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Garis Pantai, Hipsografi, Perairan, Nama Rupabumi (Toponim), Batas Wilayah, Transportasi dan Utilitas, Bangunan dan Fasilitas Umum serta Penuutup Lahan.	DPUPR	Tahunan
135	10.03.0055	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten skala 1:50.000	Geospasial		Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.	DPUPR	Lima Tahunan



 BUPATI TEMANGGUNG,



 AGUS SETYAWAN